

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN STATUS PEGAWAI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA

Nama: Debora Veronica Br Manik

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Status Aparatur Sipil Negara. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan upaya untuk melemahkan independensi KPK. Proses pelaksanaan perubahan status pegawai KPK menimbulkan persoalan yang melemahkan independensi KPK. Bahkan peraturan perundang-undangan yang baru membuat independensi KPK lebih lemah dari peraturan perundang-undangan yang lama. Peraturan perundang-undangan tersebut telah berjalan dan dilaksanakan, sehingga berpotensi besar untuk meningkatkan angka korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Perubahan Independensi Pegawai KPK, Aparatur Sipil Negara



ABSTRACT

This research is to examine the independence of the Corruption Eradication Commission after the Change in the Status of State Civil Servants. The type of research method used in this study is a normative juridical method by conducting a literature study on related legal materials. The results of this study indicate that the change in the status of KPK employees to ASN is an effort to weaken the independence of the KPK. The process of implementing the change in the status of KPK employees creates problems that weaken the independence of the KPK. Even the new laws and regulations make the independence of the KPK weaker than the old laws and regulations. These laws and regulations have been running and implemented, so that they have great potential to increase the number of corruption in Indonesia.

Keywords : *Changes in the Independence of KPK Employees, State Civil Apparatus*

